

PENGARUH KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Royda, S.E., M.Si.

Dosen Tetap Universitas Tridianti Palembang

Email : roydafauzi@ymail.com

Info Artikel :

Diterima 13 September 2016
Direview 20 September 2016
Disetujui 15 Oktober 2016

ABSTRACT

Purpose - *The research problem was how fiscal capacity influenced capital expenditure in Bangka Belitung*

Design/methodology - *The analysis period was ten years starting from 2004 to 2013. The data analysis method used is descriptive analysis. The data were analyzed by using multiple regression model with Least Squares method.*

Findings – *The results showed that the overall fiscal capacity significantly affected the capital expenditures by the coefficient of determination 83.33 percent. It was due to the fact that regional governments in Bangka Belitung had not been optimally allocating locally-generated revenues to finance regional expenditures, thus providing less stimulus for economic growth and being highly dependent on the transfer of funds from the central government.*

Keywords :

*Regions Financial
Regions Financial Independence
Regional Financial Efficiency
Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan permintaan produksi dalam perekonomian (Badrudin, 2012). Keberhasilan pembangunan ekonomi bisa diidentifikasi dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah ada beberapa indikator hasil

pembangunan yang bisa dilihat seperti PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan perkapita di suatu daerah.

Pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan media pemerintah daerah untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Hal tersebut berarti pengalokasian anggaran

publik harus lebih diperuntukkan pada kepentingan publik, misalnya dalam hal belanja modal. Daerah dituntut dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki untuk memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Semakin tinggi investasi modal, diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan (Priyo, 2012).

Belanja modal pemerintah daerah juga digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pada sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakat secara langsung dapat menikmati adanya pembangunan daerah tersebut (Wibowo, 2008). Kebijakan otonomi daerah yang sudah dijalankan pada setiap kabupaten dan kota di Indonesia dirasakan masih terdapat berbagai permasalahan seperti ketimpangan pertumbuhan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kesiapan dari masing - masing daerah yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi daerah. Permasalahan ini merupakan motivasi pertama dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagaimana kemampuan keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap belanja modal daerah mengingat Kepulauan Bangka Belitung merupakan Provinsi yang baru berdiri setelah memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keuangan Daerah

Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, pengertian Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan barang-barang inventaris milik daerah) dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Daerah).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah terhadap jumlah total penerimaan daerah.

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi nilai kemandirian keuangan daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari luar daerah terutama pemerintah pusat. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Halim, 2008:233).

Efisiensi Keuangan Daerah

Apabila pengeluaran daerah lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah maka daerah tersebut dapat dikatakan efisien pada keuangan daerahnya. Efisien Keuangan Daerah dikur dengan cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin kecil nilai efisiensi maka akan semakin efisien suatu daerah. Hal ini menyiratkan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan tersebut dapat menilai suatu kinerja keuangan daerah (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% maka dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% adalah kurang efisien, 80%-90% adalah cukup efisien, 60%-80% adalah efisien, dan dibawah 60% adalah sangat efisien.

Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Bastian, 2006: 45). Belanja daerah yang digunakan untuk keperluan pembangunan daerah adalah belanja modal atau belanja pembangunan.

Belanja modal itu sendiri merupakan investasi pemerintah yang digunakan untuk pembentukan modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya (Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 53). Pemerintah daerah harus mampu mengelola dana yang ada untuk belanja modal demi meminimalisir kesenjangan antara tingkat pelayanan pemerintah dengan harapan oleh masyarakat. Apabila pemerintah daerah sudah memberikan pelayanan publik yang optimal maka akan memberikan keuntungan di masa depan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitian adalah pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah yang tercermin dalam tingkat efisiensi dan kemandirian keuangan daerah secara keseluruhan

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengamati dan meneliti tentang pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap belanja modal di provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Periode analisis terdiri dari sepuluh tahun yang dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2013. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data time series dengan rentang waktu tahun 2004 sampai dengan 2013 yang dipublikasikan oleh situs resmi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi data yakni pengambilan data melalui dokumen tertulis baik berupa angka maupun keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Proses deskripsi data meliputi

penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung dalam data. Kemudian hasil informasi ini disajikan secara lebih ringkas dan sederhana. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi atau uji spesifikasi model. Langkah ini perlu untuk membuktikan bahwa spesifikasi model yang dibangun sudah tepat baik menurut kriteria ekonometrika, kriteria statistik dan kriteria ekonomi (Widarjono, 2013).

Metode regresi linear merupakan usaha dalam rangka untuk meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi aktual (nyata). Oleh karena itu harus diuji dengan beberapa uji asumsi sebagai berikut : uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Untuk mendapatkan model yang baik, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria statistik yang meliputi :

- Uji koefisien determinasi (R^2), Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh semua variabel independen terhadap dependen.
- Uji t, Uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui variabel

independen yang terdapat dalam model secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

- Uji F, Sedangkan Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Evaluasi model berdasarkan kriteria ekonomi dilakukan untuk melihat apakah model yang diestimasi telah sesuai dengan teori ekonomi, dengan cara melihat tanda dan besaran koefisien parameter yang menunjukkan arah dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sudah sesuai dengan teori ekonomi maupun penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, keuangan daerah merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan daerah mengoptimalkan sumber-

sumber penerimaan yang ada, baik penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, serta memanfaatkan penerimaan tersebut untuk membiayai program - program pembangunan daerah yang tercermin dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Kemampuan keuangan masing-masing daerah pada umumnya berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya. Begitu juga dengan masing-masing provinsi di wilayah Sumatera yang menunjukkan beragam perbedaan baik dari sisi penerimaan daerah maupun belanja daerahnya. Secara umum total penerimaan daerah baik di wilayah Sumatera maupun Indonesia meningkat setiap tahunnya.

Peningkatan penerimaan terjadi setiap tahunnya bahkan penerimaan daerah di Sumatera tahun 2012 mencapai enam kali dari penerimaan di tahun 2001. Rata-rata penerimaan daerah terbesar terdapat pada Provinsi Sumatera Utara yang diikuti Provinsi Riau, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk dan luas daerahnya

maka akan semakin besar juga jumlah penerimaan daerahnya. Sedangkan besarnya rata-rata kontribusi penerimaan daerah Sumatera terhadap total penerimaan pusat adalah 26,52 persen.

Selain realisasi dari penerimaan, terdapat realisasi pengeluaran daerah yang biasanya akan mengikuti besarnya jumlah realisasi penerimaan, dimana daerah yang kapasitas penerimaan daerahnya besar cenderung memiliki realisasi pengeluaran daerah yang besar juga. Begitu juga dengan realisasi pengeluaran daerah di Sumatera yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah realisasi pengeluaran di tahun 2012 untuk wilayah Sumatera mencapai 6,5 kali jumlahnya dibandingkan jumlah

realisasi pengeluaran di tahun 2001. Sedangkan rata-rata pengeluaran daerah yang terbesar masih terdapat pada provinsi Sumatera Utara yang diikuti Provinsi Riau, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan. Besaran persentase pengeluaran daerah terhadap penerimaan daerah di wilayah Sumatera adalah sebesar 83,2 persen. Besarnya persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase nasional yang sebesar 80,78 persen.

Dengan pertimbangan bahwa jumlah time series sebanyak sepuluh tahun, maka model analisis data yang akan digunakan adalah metode Least square. Hasil pengujian metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

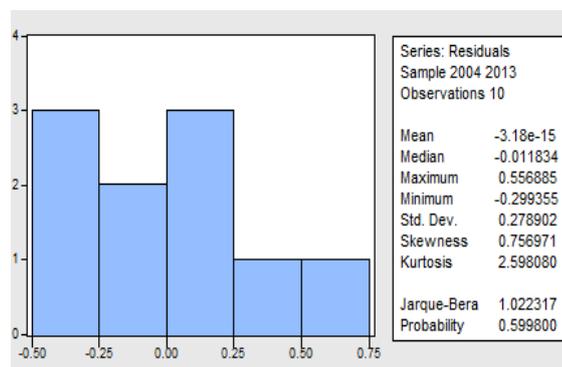
Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 10/25/16 Time: 10:33
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| X1 | -1.286503 | 0.568033 | -2.264841 | 0.0579 |
| X2 | 0.893214 | 0.319430 | 2.796276 | 0.0267 |
| C | 13.47897 | 2.730414 | 4.936603 | 0.0017 |
| R-squared | 0.833365 | Mean dependent var | | 13.75892 |
| Adjusted R-squared | 0.785755 | S.D. dependent var | | 0.683232 |
| S.E. of regression | 0.316245 | Akaike info criterion | | 0.778727 |
| Sum squared resid | 0.700077 | Schwarz criterion | | 0.869502 |
| Log likelihood | -0.893634 | Hannan-Quinn criter. | | 0.679146 |
| F-statistic | 17.50398 | Durbin-Watson stat | | 1.401829 |
| Prob(F-statistic) | 0.001889 | | | |

Gambar 1. Hasil pengujian dengan Least square

Sebelum melakukan estimasi, maka dalam penelitian ini juga dilakukan beberapa uji asumsi klasik. Pada hasil uji asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa hasil regresi

terbebas dari masalah normalitas dan heterokedastisitas, multikolinearitas serta Autokorelasi. Adapun pengujian normalitas dapat terlihat dari gambar berikut:



Gambar 2. Pengujian Normalitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis Chi Square. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual telah memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera dan nilai Chi square tabel. Uji JB didapat dari histogram normality dengan hipotesis yang digunakan $H_0 =$ data terdistribusi normal. Nilai JB sebesar 1,022317 sedangkan nilai Chi square tabel yang dilihat dari

jumlah variabel independen $k=2$, maka $df (10-2=8)$ pada $\alpha=5\%$ yakni sebesar 15.5073. Nilai $JB <$ nilai Chi square ($1,022317 < 15.5073$) sehingga H_0 diterima dan disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Permasalahan heterokedastisitas terjadi jika varian tidak konstan (heterokedastisitas) dan terjadi hubungan yang kuat antar residual. Masalah heteroskedastisitas sering dialami oleh data yang bersifat cross section. Berdasarkan hasil regresi

Least Square, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,833365. Nilai Chi square hitung sebesar 8,33365 yang diperoleh dari jumlah observasi dikali dengan nilai R^2 . Sedangkan nilai kritis Chi squared pada $\alpha=5\%$, dengan $df = 10-2 = 8$ adalah 15.5073. Oleh karena nilai Chi squared hitung lebih kecil daripada nilai kritis Chi squared, maka H_0 ditolak sehingga tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada penelitian.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi atau tidak terdapat korelasi antar variabel independennya. Multikolinearitas dapat dideteksi dari adanya nilai R^2 tinggi (lebih dari 0,80), tetapi sedikit t-statistik yang signifikan serta nilai F-statistik yang signifikan namun t-statistik dari masing-masing variabel bebas tidak signifikan. Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian.

Tabel 1. Hasil pengolahan uji multikolinearitas

| Correlation | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | X1 | X2 | Y |
| X1 | 1.000000 | -0.663561 | -0.765127 |
| X2 | -0.663561 | 1.000000 | 0.880229 |
| Y | -0.765127 | 0.880229 | 1.000000 |

Sumber : pengolahan dari evIEWS

Uji Autokorelasi, untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada model ini akan digunakan uji Durbin-Watson (DW-Test). Jika nilai DW-Test lebih besar dari batas atas (dU), maka tidak terjadi autokorelasi. Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan statistik d dari Durbin-Watson (DW test) dimana

angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah dL (angka yang diperoleh dari table DW batas bawah), dU (angka yang diperoleh dari tabel DW batas atas), $4-dL$ dan $4-dU$. Jika nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 terjadi autokorelasi.

Pengujian statistik dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), koefisien regresi secara individual (uji t), dan pengujian koefisien secara serentak (uji F). Nilai koefisien determinasi (R^2) menggambarkan kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependennya, sedangkan nilai di luar koefisien determinasi ($1 - R^2$) dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model. Dari hasil estimasi, besarnya R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,833365. Artinya variabel Y (Belanja Modal) dalam model sebesar 83,33 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang ada di dalam model yaitu Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X_2). Sementara sisanya sebesar 16,66 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini dan faktor-faktor lainnya.

Uji signifikansi parameter atau uji F dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama atau keseluruhan. Parameternya adalah bila nilai F hitung lebih besar

dibandingkan nilai F tabel atau nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari nilai $\alpha=5\%$, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Nilai F hitung sebesar 17,50398 sedangkan nilai F tabel yang dilihat dari tabel F $\alpha=5\%$ untuk $n=10$ dan $k=2$ (df pembilang = $k-1$, df penyebut = $n - k$) adalah sebesar 5.31766. Oleh karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H_0 ditolak sehingga secara bersama-sama semua variabel bebas pada penelitian secara serentak berpengaruh terhadap variabel belanja modal.

Uji signifikansi individu bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari nilai $\alpha=5\%$. Nilai t tabel dilihat dari $n=10$ dan $k=2$ yakni sebesar 1.85955. Berikut tabel uji signifikansi t ($\alpha=5\%$) :

Tabel 2. Uji Signifikansi t ($\alpha=5\%$) Belanja Modal

| Analisis | t-statistik | t-tabel | Kesimpulan |
|----------------|-------------|---------|------------|
| X ₁ | -2,2648 | 1.85955 | Signifikan |
| X ₂ | 2,7962 | 1.85955 | Signifikan |

Sumber : Diolah dari hasil regresi

Dari model regresi, terlihat bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlihat dari hasil/ nilai probabilitas koefisien determinasi sehingga hipotesis penelitian diterima.

Adanya pengaruh signifikan dan negatif pada variabel kemandirian keuangan daerah tersebut dikarenakan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat tergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah relatif kecil apabila dilihat dari statistik sehingga belum mampu untuk membiayai pengeluaran daerah pada belanja modal. Kecilnya rasio kemandirian

keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengindikasikan bahwa belum siapnya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Selain itu, kondisi alam dalam bentuk kepulauan mengakibatkan fokus pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah belum maksimal.

Efisiensi Keuangan Daerah pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil statistik, semakin tinggi rasio efisiensi keuangan daerah menyiratkan bahwa pemerintah daerah sudah berhasil dalam menganggarkan keuangan daerah. Penggunaan keuangan daerah yang tidak efisien pada daerah disebabkan realisasi pengeluaran yang lebih besar dari realisasi penerimaan sehingga terjadi pemborosan belanja daerah dan tidak dimaksimalkan

untuk belanja modal. Padahal belanja modal sangat berperan terhadap pengembangan dan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pengaruh kemampuan keuangan daerah secara keseluruhan (simultan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan model estimasi Least square menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah pada periode penelitian yakni 2004-2013 mempengaruhi belanja modal secara signifikan pada periode tersebut. Sedangkan besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa sebesar 83,33 persen belanja modal dijelaskan oleh variabel yang ada pada penelitian, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Sedangkan secara parsial, masing-masing variabel mempunyai pengaruh yang signifikan, akan tetapi variabel kemandirian keuangan daerah mempunyai arah yang positif

terhadap belanja modal pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2012. *Kemampuan keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI, No.1, 2012, Hal. 1-19.
- Badrudin, Rudi. 2012. *Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.6. No.3. November (2012), Hal.249-264.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Wibowo, Puji. 2008. *Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol.5, No.1, Oktober 2008 Hal.55-83.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Realisasi APBD Tahun 2004-2012 dalam: www.djpk.depkeu.go.id